BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengatur kegiatan-kegiatan melalui orang lain sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dilaksanakan satu orang saja. Manajemen merupakan sebuah proses pemanfaatan semua sumber daya melalui orang lain dan bekerja sama dengan semua elemen. Proses tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama secara efektif, efesien, dan produktif. Sedangkan manajemen dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematis, dan integratif.[[1]](#footnote-2) Proses tersebut dimulai dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.

Manajemen tidak dapat dipisahkan dari administrasi dan organisasi. Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kerja sama dan mengerahkan seluruh potensi yang ada dan yang tersedia berupa benda maupun manusia seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sedangkan organisasi adalah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, di mana sub sistem manusia merupakan subsistem terpenting, sehingga terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi bersangkutan.[[2]](#footnote-3) Dengan demikian untuk mencapai tujuan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan sekali manajemen pendidikan yang baik.

Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah Adminitrasi pendidikan.

Administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan, kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi, perencanaan, pegorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materil, maupaun spirituil, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien.[[3]](#footnote-4)

Manajemen lebih ditekankan kepada upaya untuk mempergunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Menurut Made Pidarta dalam Soebagio Atmodiwiro, Manajemen Pendidikan adalah aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.[[4]](#footnote-5)

Yang dimaksud dengan sumber daya adalah ketenagaan, dana, sarana, dan prasarana termasuk informasi. Dengan demikian kemampuan seorang manajer memadukan sumber daya tersebut merupakan hal yang sangat penting. Dalam defenisi ini tentu saja meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sebagai fungsi-fungsi manajemen. Bagaimana sumber daya direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Mengenai fungsi-fungsi fundamental manajemen, tampaknya hampir seluruh ahli sepakat intinya ada empat, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating,* dan *controlling*. Perencanaan *(planning)* merupakan proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Pelaksananaan (*actuating*) proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi, sedangkan pengawasan (*controlling* ) merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan pendidikan yang dihadapi.

Pada umumnya organisasi di Indonesia mengalami keterbatasan dalam bidang sumber daya, sementara di sisi lain tujuan yang ingin dicapai harus bisa dilakukan secara baik. Proses manajemen itu sendiri diarahkan kepada usaha-usaha anggota organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya melalui pemanfaatan secara efektif dan efisien sumber daya yang tersedia. Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Keluaran bisa terdiri barang atau jasa. Sedangkan masukan terdiri dari sumber daya manusia (*human resorces*), dan modal (*capital*), peralatan-peralatan (*materials*), dan sumber daya lainnya. Efisiensi adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya (masukan), sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai.

Manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Manajemen pendidikan dapat didefenisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu menusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab kemasyarakatan dna kebangsaan.[[5]](#footnote-6)

Di samping itu masih dijumpai pendekatan yang melihat manajemen pendidikan dari sudut upaya menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan, seperti yang dikemukakan oleh Richard H. Hastrop dalam Subagio Atmodiwirio, manajemen pendidikan adalah upaya seseorang untuk mengerahkan, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, dan menerima pertanggung jawaban pribadi untuk mencapai pengukuran hasil yang ditetapkan.[[6]](#footnote-7)

Meski ditemukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa antara manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan tidak dapat dipisahkan meskipun ada perbedaan. Perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar hanya saja belum terlalu banyak orang yang memakai istilah manajemen pendidikan dibandingkan dengan administrasi pendidikan, tetapi dikalangan akademisi manajemen pendidikan tidak lagi termasuk hal yang baru.

Berikut ini dapat diperhatikan fungsi manajemen pendidikan sebagai berikut :

1. Fungsi Perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan, dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana, yang menjangkau ke depan untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan dikemudian hari, menentukan tujuan yang hendak dicapai, menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta menentukan jadwal dan proses kerja.
2. Fungsi pengorganisasian, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan secara integral. Untuk itu perlu melakukan kegiatan-kegiatan, seperti : mengidentifikasi jenis dan tugas tanggung jawab dan wewenang, merumuskan aturan hubungan kerja.
3. Fungsi koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasil program pendidikan
4. Fungsi motifasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan tadi, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan program ini
5. Fungsi kontrol, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen pendidikan tersebut.[[7]](#footnote-8)

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam manajemen pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat umum yang dilakukan semua lembaga yang mengurusi masalah pendidikan. Berbeda dengan menajemen sekolah yang memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan yang luas untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan nasional.

Pemberian otonomi yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah.

Otonomisasi sektor pendidikan berarti seluruh aktivitas yang berhubungan dengan sekolah merupakan hak khusus bagi sekolah untuk mengurusnya, sedangkan pemerintah hanya menjadi fasilitator. Hal ini seiring dengan yang diungkapkan oleh Dede Rosyada bahwa pendidikan di Indonesia kini memasuki era reformasi dengan pembaharuan radikal, yang diangkat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni pendelegasian otoritas pendidikan pada daerah dan mendorong otonomisasi di tingkat sekolah, serta pelibatan masyarakat dalam pengembangan program-program kurikuler dan program sekolah lainnya. Kewenangan pemerintah kini adalah fasilitatif terhadap berbagai usulan pengembangan yang digagas sekolah[[8]](#footnote-9).

Pendidikan mempunyai hak otoritas dalam pengaturan seluruh elemen-elemen dan komponen sekolah untuk menciptakan dan melahirkan cita-cita yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dalam hal ini sekolah dapat bekerjasama dengan pihak luar (komite sekolah, masyarakat, dan pemerhati pendidikan lainnya) sebagai perwujudan cita-cita sekolah, agama dan bangsa.

Berbicara tentang demokratisasi pendidikan berarti bahwa adanya nilai-nilai kedewasaan dalam menerima seluruh kritikan yang membangun bagi kelanjutan sekolah. Dede memberikan gagasan penting mengenai demokratisasi yang ia maksud dengan memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tidak sekedar dalam konteks retribusi uang sumbangan pendidikan, justru dalam pembahasan dan kajian untuk mengidentifikasi berbagai permintaan stakeholder dan user sekolah tentang kompetensi siswa yang akan dihasilkannnya[[9]](#footnote-10).

Adanya kerjasama yang baik antara komponen-komponen tersebut di atas, dapat menciptakan sebuah manajemen yang baik, memiliki orientasi kerja yang jelas di dalam sebuah institusi pendidikan. Yang paling mendasar dalam persoalan ini adalah adanya kemampuan sumber daya manusia yang mengerti, memahami, dan mampu untuk menerima perubahan ke arah yang lebih baik serta tidak menghapuskan hal-hal yang mesti ada di sekolah tersebut seperti adanya mata pelajaran yang idealnya untuk dipelajari diganti dengan mata pelajaran yang tidak semestinya dipelajari.

Terkait dengan demokratisasi penyelenggaraan sekolah, menurut Dede ada tiga aspek yang penting menjadi pusat perhatian. *Pertama*, demokratisasi dalam penyusunan, pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. *Kedua*, demokratisasi dalam proses pembelajaran sejak penyiapan program pembelajaran, sampai implementasi proses pembelajaran ketiga, demokratisasi manajemen[[10]](#footnote-11). Dalam konteks ini sekolah harus memperbesar pelibatan *teamwork* dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan program, pendistribusian tugas dan wewenang, serta perubahan paradigma dalam menilai produktivitas kerja setiap unsur organisasi sekolah, dengan orientasi kepuasan pelanggan.

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan yang merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, tetapi sekolah berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan. Oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan berkualitas tinggi sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Juga diharapkan sekolah dapat meningkatkan derajat sosial masyarakat perlu dikelola, diatur, ditata, dan diberdayakan agar dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal.

Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan dan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Secara internal, sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki *stakeholders* ( pihak yang berkepentingan ), antara lain siswa, pendidik, masyarakat, pemerintah, komite sekolah dan dunia usaha. Oleh karena itu sekolah memerlukan pengelolaan (manajemen) yang akurat agar dapat memberikan hasil optimal, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan.

Manajemen mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya yang berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah di sekolah. Penerapan hal itu memerlukan suatu perubahan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara lokal. Perubahan kebijakan memerlukan kesiapan berbagai sumber daya dan kemampuan pengelola di tingkat sekolah.

Isu sentralisasi dan desentralisasi yang sebelumnya telah dimunculkan sebagai upaya pemberdayaan daerah semakin menguat. Situasi sosial politik diyakini bisa diatasi dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan sekolah melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang intinya kewenangan dan pendelegasian kewenangan kepada sekolah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

MBS sebagai terjemahan dari *School Based Management* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan komite sekolah. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal.

MBS merupakan perwujudan dari reformasi pendidikan yang menginginkan adanya perubahan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik dengan memberikan kewenangan ( otoritas ) kepada sekolah untuk memberdayakan dirinya, pada prinsipnya menempatkan kewenangan kepada sekolah dan masyarakat untuk menghindari format sentralisasi dan birokratisasi yang dapat menyebabkan hilangnya fungsi manajemen sekolah.

Asumsi yang mendasari implementasi Manajemen Berbasis Sekolah adalah *pertama,* bahwa sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan di mana kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Konsekwensinya kepala sekolah dituntut bertaggung jawab atas keseluruhan komponen sekolah dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pendidikan yang berorientasi pada pemakai, baik siswa maupun masyarakat, pemerintah maupun lembaga industri dan dunia kerja. *Kedua,* MBS dapat efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagai kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sekolah ditata secara rapi. Dengan MBS sekolah dipandang sebagai suatu unit manajemen yang utuh dan memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pengembangannya. Perlakuan khusus ini akan berbeda pada setiap sekolah. Hal inilah yang melandasi kayakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola pendidikan seharusnya dilakukan di tingkat sekolah.

Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama dengan manajemen pendidikan, yang membedakannya adalah manajemen pendidikan cakupannya lebih luas dibandingkan dengan manajemen sekolah. Manajemen sekolah terbatas hanya pada satu sekolah saja. Komponen-komponen manajemen sekolah menurut E.Mulyasa adalah sebagai berikut :[[11]](#footnote-12)

1. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran

Manajer sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

1. Manajemen Tenaga Kependidikan

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efesien untuk mencapai hasil yang optimal

1. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik yang bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib dan teratur serta mencapai tujuan sekolah.

1. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan

Manajemen keuangan dan pembiayaan yang merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengeloaan pendidikan.

1. Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan.

1. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat

Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk memajukan kualitas pembelajaran, meningkatkan kualiatas hidup dan penghidupan masyarakat serta menggairahkan masyarakat yang menjalin hubungan dengan sekolah melalui pinformasi yang diberikan sekolah mengenai program-program sekolah.

1. Manajemen Layanan Khusus

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah.

Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efesien, kepala sekolah harus memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, fungsi-fungsi manajemen, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Wibawa kepala sekolah harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Lebih lanjut kepala sekolah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer sekolah dalam meningkatkan proses belajar mengajar, dengan melakukan supervisi kelas, membina, dan memberikan saran-saran positif kepada guru.

Guru juga harus berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas, sebab guru merupakan teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Justru itu guru harus siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan materi pengajaran.

Pelaksanaan MBS dalam pengelolaannya, yang perlu diingat kembali bahwa tujuan utama MBS adalah untuk meningkatkan kinerja seluruh warga sekolah terutama agar dapat menjalin kerja sama saling bahu membahu demi mendongkrak prestasi sekolah. Berbagai literatur menunjukan adanya beberapa strategi untuk mencapai keberhasilan implementasi MBS, strategi tersebut adalah :

*Pertama,* sekolah harus memiliki otonomi terhadap empat hal yaitu dimilikinya kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi kesegala bagian dan pemberian penghargaan kepasa setiap orang yang berhasil.

*Kedua,*adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non instruksional.

*Ketiga,* adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif

*Keempat,* adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam dewan sekolah yang aktif

*Kelima,* semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.

*Keenam,* adanya *guidelines* dari Departemen terkait sehingga mampu mendorong proses pendidikandi sekolah secara efesien dan efektif. Guidelines itu jangan sampai berupa pertauran-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah

*Ketujuh,* sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya.

*Kedelapan,* penerapan MBS harusdiarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian belajar siswa

*Kesembilan,* implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan.[[12]](#footnote-13)

Apabila strategi MBS dapat diaplikasikan secara nyata, akan langsung memberi konstribusi terhadap empat keluaran pendidikan yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk personel, meningkatkan profesional guru, implementasi reformasi kurikulum dan meningkatkan keikutsertaan masyararakat dalam pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan observasi awal untuk melihat pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ( MBS ) di Sekolah Dasar Islam Raudhatul Jannah yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Islam Payakumbuh. SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh mulai berdiri tahun 1992 M yang terletak di Kelurahan Koto baru, dengan jumlah guru dan pegawai saat ini sebanyak 59 orang .

**Tabel 1**

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di SD Islam Raudhatul Jannah

Payakumbuh

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URAIAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH | KET |
| L | P |
| 1 | Kepala sekolah | 1 | - | 1 |  |
| 2 | Waka | 2 | - | 2 |  |
| 3 | Guru | 7 | 39 | 46 |  |
| 4 | Pegawai/tata usaha | 1 | 3 | 4 |  |
| 5 | Pustakawan | - | 2 | 2 |  |
| 6 | Cleaning service | - | 1 | 1 |  |
| 7 | Security | 3 | - | 3 |  |
| JUMLAH | | 14 | 45 | 59 |  |

Sumber Data : *Dokumentasi SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh*[[13]](#footnote-14)

Tenaga Pendidik dan pegawai di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh pada umumnya memiliki kualifikasi pendidikan strata satu (S1) dan memiliki rasa tanggung jawab penuh serta mempunyai kompetensi sebagai seorang pendidik. Dengan adanya rasa tanggung jawab dan mempunyai kompetensi yang baik, sehingga sekolah ini mendapatkan serangkaian prestasi baik prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Tenaga pendidik yang PNS yang dimiliki SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh hanya 1 orang yaitu Kepala sekolah dan selebihnya adalah tenaga yang digaji oleh Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh menurut golongan dan masa kerja. Golongan yang dimaksud berdasarkan kualifikasi pendidikan, mulai dari tingkat SLTA, D1, D2, D3, S1, dan S2. Demikian juga halnya dengan masa kerja, jadi antara guru yang memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi dan masakerja lama tidak akan sama dengan yang memiliki kualifikasi S2 dengan masa kerja sedikit.

Perekrutan tenaga pendidik atau pegawai lainnya dilakukan dengan tes tertulis dan wawancara, setelah dinyatakan diterima tiga bulan pertama melalui masa uji coba dengan gaji Rp. 500.000,/bulan, tiga bulan berikutnya masa magang. Ketika tiga bulan pertama dan kedua tetap diadakan penilaian oleh pihak yayasan dengan kepala sekolah untuk menguji kelayakan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, setelah melalui proses tersebut maka pihak yayasan dan kepala sekolah dapat memutuskan diterima atau tidaknya guru/pegawai tersebut. Jadi menurut hemat penulis bahwa perekrutan pegawai di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh melalui proses yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tenaga pendidik dan pegawai yang ada di sini memiliki kemampuan yang baik.

Kemampuan kepala sekolah dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki akan berpengaruh sekali terhadap lembaga yang dipimpinnya untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Sehingga dengan pemberdayaan sumber yang ada seefektif dan seefesien mungkin juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi, penulis memperoleh data bahwa mulai dari tahun 2004 sampai 2010 telah banyak prestasi yang diperoleh sekolah ini baik tingkat Kecamatan, Kota, Propinsi bahkan tingkat Nasional. Prestasi tersebut adalah prestasi akademik dan non akademik. Di samping prestasi akademik masih banyak prestasi non akademik yang diraih oleh SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh yang merupakan peringkat terbaik, juga sampai ke tingkat Nasional.

Tabel 2

**Jumlah siswa di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHUN PELAJARAN | JUMLAH | | JUMLAH |
| lk | pr |
| 1 | 1992/1993 | 10 | 8 | 18 orang |
| 2 | 1993/1994 | 22 | 21 | 42 orang |
| 3 | 1994/1995 | 41 | 44 | 85 orang |
| 4 | 1995/1996 | 50 | 69 | 109 orang |
| 5 | 1996/1997 | 60 | 60 | 120 orang |
| 6 | 1997/1998 | 112 | 116 | 128 orang |
| 7 | 1998/1999 | 322 | 327 | 649 orang |
| 8 | 1999/2000 | 337 | 335 | 772 0rang |
| 9 | 2000/2001 | 377 | 364 | 741 0rang |
| 10 | 2001/2002 | 377 | 403 | 780 0rang |
| 11 | 2002/2003 | 384 | 400 | 784 0rang |
| 12 | 2003/2004 | 393 | 396 | 789 0rang |
| 13 | 2004/2005 | 370 | 418 | 788 0rang |
| 14 | 2005/2006 | 379 | 400 | 779 0rang |
| 15 | 2006/2007 | 384 | 434 | 818 0rang |
| 16 | 2007/2008 | 418 | 443 | 861 0rang |
| 17 | 2008/2009 | 445 | 486 | 931 0rang |
| 18 | 2009/2010 | 440 | 492 | 932 0rang |
| 19 | 2010/2011 | 484 | 494 | 978 orang |

Sumber : *Dokumentasi SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh[[14]](#footnote-15)*

Dalam perjalannya sekolah ini mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat baik dari prestasi akademik maupun non akademik juga dari jumlah siswa yang masuk ke sekolah ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti yang telah diuraikan terdahulu yang mana tahun 1992 dengan jumlah murid hanya berjumlah 18 orang dan sampai saat ini tahun pelajaran 2010/2011 telah mencapai 978 orang. *[[15]](#footnote-16)*

Meningkatnya jumlah siswa yang masuk ke sekolah ini setiap tahunnnya merupakan salah satu tanda bahwa sekolah ini dikelola dengan baik atau memiliki manajemen yang baik. Penerapan manajemen terhadap suatu lembaga tak terlepas dari peranan kepala sekolah, guru, karyawan, dan komite sekolah. Juga dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik akan membawa pengaruh terhadap perjalanan dan mutu sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai seorang manajer yang mampu memanajerial komponen-komponen yang ada di sekolah tersebut dan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar melalui komite sekolah. Diantara upaya komite sekolah untuk membantu sekolah melalui pembentukan donatur tetap sekolah dan juga menggaet sumber dana lainnya melalui infaq serta pihak swasta.

Mencermati masalah di atas yang telah dideskripsikan, penulis ingin meneliti implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, kenapa sekolah ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi wali murid yang ditandai dengan melonjaknya jumlah calon siswa yang masuk setiap tahunnya, dan proses pembelajaran dapat diciptakan dengan kondisi kondusif dan menyenangkan serta out put pendidikan mempunyai keterampailan ( *skill* ) dan berkualitas sehingga mampu bersaing dengan lulusan sekolah lainnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan judul : ***“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh*”**

1. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
   1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis perlu memberikan rumusan masalah yang hendak dijawab adalah Bagaimana implementasi manajemen berbasis sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh ?

* 1. Fokus Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibatasi fokus masalah sebagai berikut :

1. Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
2. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
3. Manajemen Tenaga Kependidikan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
4. Manajemen Kesiswaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
5. Manajemen keuangan dan Pembiayaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
6. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
7. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
8. Manajemen Layanan Khusus di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
9. Defenisi Operasional

Judul penelitian ini adalah “***Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh***” untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam judul serta teori yang berkaitan. Kerangka teori yang lazim disebut dengan kajian kepustakaan menjadi pegangan bagi peneliti untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan serta digunakan sebagai titik tolak dalam penelitian, sehingga kesimpang siuran dari pengembangan yang terlalu luas dapat dihindari. Adapun pengertian dari judul ini adalah sebagai berikut :

**Implementasi** adalah pelaksanaan; penerapan. Implementasi yang penulis maksud di sini adalah pelaksanaan manajemen sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh yang telah diupayakan oleh kepala sekolah

**MBS** sebagai terjemahan dari *School Based Management* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada Kepala Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, dan komite sekolah. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan memindahkan otoritas pengambilan keputusan dan manajemen ke setiap pihak yang berkepentingan di tingkat lokal.

MBS yang penulis maksud di sini adalah Manajemen Berbasis Sekolah yang diterapkan di lokasi penelitian yang penulis pilih, yang menjadi pokok penelitian penulis yaitu : Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, Manajemen Tenaga Kependidikan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, Manajemen Kesiswaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, Manajemen keuangan dan Pembiayaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, dan Manajemen Layanan Khusus di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh

**SD Islam Raudhtaul Jannah Payakumbuh** adalah sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar yang bernuansa Islami merupakan lokasi penelitian yang terletak di Kota Payakumbuh

1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
   1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, sedangan secara khusus penelitian ini bertujaun untuk mengetahui :

* + 1. Kepemimpinan Kepala Sekolah di SD islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    2. Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    3. Manajemen Tenaga Kependidikan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    4. Manajemen Kesiswaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    5. Manajemen keuangan dan Pembiayaan di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    6. Manajemen Sarana dan Prasarana di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
    7. Manajemen Layanan Khusus di SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh
  1. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan ilmiah dalam pengembangan sekolah yang mengacu kepada sistem manajemen berbasis sekolah. Sementara secara praktis diharapkan berguna untuk :

* + 1. Kepala SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh selaku pimpinan, sebagai masukan agar dapat lebih meningkatkan kreatifitas untuk mengelola sekolah menajadi lebih unggul
    2. Guru-guru SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, agar lebih meningkatkan profesionalismenya
    3. Komite SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah dan dapat menyalurkan partisipasi masyarakat melalui peranan komite sekolah
    4. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh, agar lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak sekolah dan pihak pemerintah ataupun swasta untuk peningkatan sekolah dimasa yang datang.

1. Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Kalam Mulia, 2008 ), h. 261 [↑](#footnote-ref-2)
2. J. Winardi, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006 ) , h. 24 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan,*( Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 1987 ),h.4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Soebagio Atmodiwirio, *Manajemen* *Pendidikan Indonesia,*(Jakarta : PT. Ardadizya Jaya, 2000 ), h. 22 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , *Manajemen Pembinaan Pendidikan,* ( Jakarta : Biro Perencanaan, 1992/1993), h. 4 [↑](#footnote-ref-6)
6. Subagio Atmodiwirio, *Op.cit,*h. 23 [↑](#footnote-ref-7)
7. Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum,*( Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.2008 ), h 22-23 [↑](#footnote-ref-8)
8. . Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. xi [↑](#footnote-ref-9)
9. . *Ibid,* h. xii [↑](#footnote-ref-10)
10. . *Ibid*, h. xiii [↑](#footnote-ref-11)
11. E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah,*( Bandung : PT.Remaja Rosda Karya, 2009), h.40 [↑](#footnote-ref-12)
12. E. Mulyasa, *Ibid,* h.58 [↑](#footnote-ref-13)
13. Dokumentasi SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh [↑](#footnote-ref-14)
14. Dokumentasi SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh [↑](#footnote-ref-15)
15. Dokumentasi SD Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh [↑](#footnote-ref-16)